

Peran Ketidaktransparanan Publikasi Epstein Files terhadap Legitimasi Kredibilitas Amerika Serikat sebagai Promotor Demokrasi Global

Fleycia Tandria¹, Ushwatul Jannah²

¹ Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Universitas Abdurrah, Indonesia

² Dosen Program Studi Hubungan internasional Universitas Abdurrah, Indonesia

Received : 17 Juni 2026, Revised : 30 Juni 2026, Published : 13 Juli 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Fleycia Tandria

E-mail: fleyciatandria@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontradiksi antara komitmen transparansi Amerika Serikat dengan praktik penyensoran informasi dalam publikasi Epstein Files pada periode tahun 2024 hingga 2026. Sebagai negara yang selama ini memposisikan dirinya sebagai promotor demokrasi global, AS menghadapi krisis kredibilitas ketika perilsan jutaan halaman dokumen terkait kejahatan Jeffrey Epstein justru diiringi dengan redaksi besar-besaran yang didukung dengan dalih keamanan nasional. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan tersebut berefek pada posisi Amerika Serikat di ranah internasional, dengan menggunakan kerangka teori konstruktivisme, soft power, dan organized hypocrisy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidakkonsistenan antara narasi transparansi dalam Epstein Files Transparency Act dengan kenyataan di lapangan menciptakan standar ganda yang melemahkan posisi tawar Amerika Serikat ketika mengkritik tata kelola negara lain. Ketidaklengkapan pengungkapan dokumen ini tidak hanya menghambat akuntabilitas global, tetapi juga memberi ruang bagi negara-negara lain untuk mempertanyakan integritas moral Amerika Serikat.

Kata Kunci - epstein files, transparansi, amerika serikat, kredibilitas, demokrasi

Abstract

This research analyzes the contradiction between the United States' transparency commitments and the practice of information censorship in the publication of the Epstein Files during the 2024 to 2026 period. As a nation that has long positioned itself as a global democracy promoter, the United States faced a credibility crisis when the release of millions of pages related to Jeffrey Epstein's transnational crimes was accompanied by extensive redactions under the guise of national security. Using a qualitative descriptive method through library research, this study examines how these policies affected U.S. soft power and international standing, drawing on the theoretical frameworks of constructivism, soft power, and organized hypocrisy. The findings indicate that the inconsistency between the transparency narrative in the Epstein Files Transparency Act and its implementation created a perception of double standards that weakens the U.S. bargaining position when critiquing governance in other countries. This incomplete disclosure not only hampers global accountability but also provides space for other countries to question the moral integrity of the United States.

Keywords - epstein files, transparency, united states, credibility, democracy

How To Cite : Tandria, F., & Jannah, U. (2026). Peran Ketidaktransparanan Publikasi Epstein Files terhadap Legitimasi Kredibilitas Amerika Serikat sebagai Promotor Demokrasi Global. Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa, 3(2), 311 - 317. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v3i2.922>

Copyright ©2026 Fleycia Tandria, Ushwatul Jannah

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Amerika Serikat telah lama memposisikan dirinya sebagai pusat demokrasi dan promotor nilai transparansi di ranah global. Melalui berbagai kesempatan, AS menekankan betapa pentingnya keterbukaan informasi sebagai standar kelayakan suatu negara demokratis. Citra ini bukan sekadar identitas, melainkan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengkritik serta mengevaluasi tata kelola pemerintahan di negara-negara lain (U.S. Department of State, 2024). Namun, konsistensi tersebut kini berubah menjadi sesuatu yang kontradiktif seiring tindakan perilsan dokumen Jeffrey Epstein selama periode tahun 2024 hingga 2026. Urgensi permasalahan ini terletak pada adanya ketidakselarasan antara kebijakan resmi dan fakta di lapangan. Meskipun AS telah mengesahkan Epstein Files Transparency Act di akhir tahun 2025, proses publikasi dokumen pada awal 2026 justru diiringi dengan redaksi dokumen yang massif. Penggunaan pembenaran yang mengatasnamakan keamanan nasional dan perlindungan privasi untuk menutupi identitas aktor-aktor kunci serta detail transaksi dalam dokumen tersebut memicu perdebatan terhadap keseriusan komitmen transparansi Amerika Serikat. Mengingat jaringan kejahatan ini yang telah termasuk dalam Tindakan yang bersifat transnasional dan melibatkan figur-figur elit, kebijakan sensor tersebut tidak lagi dipandang semata-mata sebagai urusan domestik saja, melainkan telah masuk dalam ranah isu internasional.

Fenomena ini memperkuat standar ganda yang berpotensi melemahkan posisi tawar diplomasi Amerika di mata dunia. Ketika sebuah negara secara aktif mengkampanyekan nilai transparansi global, tetapi justru melakukan proteksi informasi besar-besaran pada skandal di dalam negaranya sendiri, hal tersebut memberikan celah bagi aktor internasional lain untuk mulai mempertanyakan integritas Amerika Serikat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk menganalisis bagaimana kebijakan sensor terhadap Epstein Files dapat berpengaruh pada penurunan legitimasi kredibilitas Amerika Serikat sebagai promotor demokrasi global.

Sejalan dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengambil rumusan masalah berupa bagaimana praktik penyensoran dalam publikasi dokumen Epstein Files pada periode tahun 2024-2026 menciptakan persepsi standar ganda pada kebijakan transparansi Amerika Serikat? Penelitian ini juga memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis kontradiksi antara komitmen transparansi Amerika Serikat melalui *Epstein Files Transparency Act* dengan aksi penyensoran yang terjadi di lapangan, serta untuk meneliti implikasi dari kebijakan penyensoran tersebut terhadap citra Amerika Serikat di mata dunia

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai hubungan antara transparansi kebijakan dan kredibilitas internasional Amerika Serikat sebenarnya sudah cukup banyak, meskipun belum ada yang mengkerucut langsung untuk membahas kasus Epstein Files. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 buah tema besar, yaitu inkonsistensi soft power AS, standar ganda dalam promosi demokrasi, serta kerahasiaan kebijakan dan dampaknya terhadap kepercayaan dunia internasional.

Tema pertama, Ayuningtyas dkk. (2025) dalam penelitiannya yang berjudul "Paradoks Soft Diplomacy Amerika Serikat: Diplomasi Budaya melalui Program AMINEF terhadap Kebijakan Imigrasi Restriktif" yang diterbitkan di Jurnal Riwayat USK, menemukan bahwa ketidaksinkronan antara pesan yang disampaikan Amerika melalui diplomasi budaya dengan kebijakan domestik yang restriktif justru menciptakan ambiguitas di mata publik internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya ketidakonsistenan antara 2 dimensi kebijakan, inklusif dan eksklusif, melemahkan kredibilitas AS sebagai aktor diplomasi global. Relevansinya terhadap penelitian ini cukup jelas, yaitu keduanya sama-sama melihat bagaimana kontradiksi internal kebijakan Amerika mempengaruhi soft power-nya, meski dengan kasus yang berbeda. Perbedaannnya, penelitian sebelumnya dari penelitian Ayuningtyas dkk. berfokus pada membedah kebijakan imigrasi, sementara penelitian ini melihat

kontradiksi yang lebih langsung, antara undang-undang transparansi yang disahkan sendiri oleh AS dengan bagaimana realita yang mereka tunjukkan di lapangan.

Memasuki tema kedua, Al Talei (2021) melalui Carnegie Endowment for International Peace menyoroti dilema Amerika dalam mempromosikan demokrasi dan HAM di area Timur Tengah. Penelitian ini menemukan bahwa AS menghadapi dua persoalan kredibilitas yang saling berkaitan, kebijakannya yang dianggap bias terhadap figur elit di kawasan tersebut, serta kecenderungan untuk menerapkan standar yang tidak konsisten tergantung pada kepentingan strategis. Temuan ini menjadi penting sebab hal tersebut memperkuat argumen bahwa persoalan standar ganda dalam kebijakan luar negeri AS bukan peristiwa baru, dan kasus Epstein Files bisa dipandang sebagai perpanjangan dari pola yang sudah ada dalam konteks yang berbeda, yakni transparansi domestik yang berdampak ke citra internasional.

Pada tema terakhir, Carnegie (2021) dalam *Annual Review of Political Science* mengkaji bagaimana kerahasiaan dalam kebijakan luar negeri mempengaruhi akuntabilitas domestik dan kepercayaan publik. Penelitian ini menemukan bahwa kerahasiaan yang dibenarkan atas dasar kepentingan nasional kerap digunakan secara luas melebihi batas yang semestinya, dan hal ini berujung pada terdampaknya kemampuan publik untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Meskipun penelitian tersebut lebih berfokus pada dimensi domestik, argumentasinya relevan untuk memahami mengapa redaksi masif dalam perilsan Epstein Files, yang dibenarkan dengan alasan keamanan nasional, sulit diterima sebagai langkah yang bijak apa lagi dalam konteks kejahatan yang sifatnya sudah transnasional.

Berdasarkan ketiga kelompok penelitian di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing menyentuh sebagian dari persoalan yang diangkat dalam penelitian ini, ada yang membahas inkonsistensi soft power, ada yang melihat standar ganda dalam promosi demokrasi, serta ada yang ikut mengkaji dampak kerahasiaan kebijakan. Namun, belum terdapat sebuah penelitian yang menggabungkan ketiganya dalam satu kasus yang melibatkan perilsan dokumen hukum transnasional dan disertai dengan undang-undang transparansi yang secara eksplisit dilanggar dalam pelaksanaannya. Penelitian ini hadir untuk mencoba mengisi celah tersebut, dengan melihat Epstein Files bukan hanya sebagai skandal domestik, tapi juga sebagai peristiwa yang memiliki efek nyata terhadap legitimasi kredibilitas AS sebagai promotor demokrasi global.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data berupa studi Pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah Amerika Serikat, laporan organisasi internasional, serta literatur-literatur yang relevan. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan literatur, analisis, serta penarikan kesimpulan yang disesuaikan dengan kerangka pemikiran yang digunakan.

PEMBAHASAN

Konstruktivisme

Penelitian ini menggunakan teori konstruktivisme sebagai landasan teori utama, khususnya yang dikembangkan oleh Alexander Wendt. Wendt berpendapat bahwasanya perilaku negara di dunia internasional tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan militer atau ekonomi saja, tetapi juga oleh identitas yang terbentuk lewat interaksi sosial yang terus berlangsung. Identitas itu yang membentuk kepentingan, dan kepentingan yang kemudian membentuk tindakan. Wendt pernah menyatakan: “anarchy is what states make of it”, sistem internasional bukan sesuatu yang datang begitu saja, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang dibuat oleh negara-negara itu sendiri (Wendt, 1992). Relevansinya ke penelitian ini bisa dilihat pada perilaku AS yang telah lama membangun identitas

sebagai negara yang paling vokal terkait persoalan transparansi dan akuntabilitas di tingkat global. Identitas itu bukan hanya label, melainkan juga berfungsi sebagai dasar untuk menilai dan menekan negara lain yang dianggap tidak demokratis (U.S. Department of State, 2024). Ketika identitas itu tidak sejalan dengan apa yang terjadi dalam perilsan Epstein Files, aspek yang terdampak tidak akan terbatas pada reputasi negara saja, tetapi juga landasan normatif dari seluruh posisi diplomatik yang dibangun atas identitas tersebut. Dalam kerangka Wendt, inkonsistensi seperti ini menyentuh legitimasi identitas yang sudah bertahun-tahun dibentuk lewat interaksi dengan aktor internasional lain (Wendt, 1999).

Soft Power

Identitas normatif yang sudah sejak lama dibentuk tersebut pada akhirnya tidak berdiri sendiri, hal ini berubah menjadi apa yang disebut Joseph Nye sebagai *soft power*. Nye dalam *The Means to Success in World Politics* (2004) mendefinisikan *soft power* sebagai kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi negara lain bukan melalui sebuah paksaan, melainkan sebaliknya yakni melalui daya tarik nilai, budaya, dan kebijakan. Nye mengelompokkan 3 sumber utama *soft power*, yaitu budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negeri yang dipandang konsisten dan sah oleh pihak lain. Berdasarkan tiga unsur tersebut, dua yang paling relevan dalam konteks penelitian ini adalah nilai-nilai politik dan kebijakan luar negeri. Nilai-nilai politik bekerja sebagai sumber *soft power* hanya ketika negara yang bersangkutan benar-benar menjalankannya, bukan sekadar mengkampanyekannya (Nye, 2004). Transparansi adalah salah satu nilai yang paling sering disuarakan AS, dan itu pula yang membuat kasus Epstein Files menjadi sebuah kontradiksi. Ketika nilai tersebut tidak dijalankan secara konsisten, daya tarik yang selama ini bersumber dari aspek itu akan ikut melemah. Hal yang sama berlaku untuk kebijakan luar negeri. Kebijakan yang terlihat munafik atau terlalu melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu akan menggerus *soft power* alih-alih memperkuatnya (Nye, 2004). Undang-undang transparansi yang disahkan hampir bulat oleh Kongres tetapi diikuti redaksi besar-besaran tanpa penjelasan yang memadai, adalah contoh nyata dari dinamika ini. IP Quarterly pada Februari 2026 juga mencatat bahwa penurunan *soft power* Amerika justru terlihat paling tajam di negara-negara yang selama ini juga menyuarakan nilai demokrasi, karena mereka memahami betul standar yang seharusnya dijaga (IP Quarterly, 2026).

Organized Hypocrisy

Sesuatu yang juga perlu diketahui adalah fakta bahwa ketidakkonsistenan semacam ini bukan fenomena baru ataupun terjadi karena kebetulan. Stephen Krasner dalam *Sovereignty: Organized Hypocrisy* (1999) memiliki pendapat bahwa kesenjangan antara norma yang dipromosikan dengan praktik yang dijalankan bukan merupakan hal langka dalam hubungan internasional, justru ini adalah pola yang lazim terlihat pada negara-negara besar. Negara adidaya kerap menggunakan ambiguitas kebijakan sebagai ruang untuk melindungi kepentingan domestik, bahkan ketika itu berarti negara harus mengabaikan norma yang mereka usung sendiri (Krasner, 1999). Pola ini yang kemudian terlihat dalam proses perilsan Epstein Files. Undang-undang telah secara jelas melarang penutupan dokumen atas dasar kepentingan politik apapun, tetapi dalam praktiknya DOJ justru merilis dokumen dengan redaksi yang sangat massif tanpa penjelasan yang memadai, bahkan kepada anggota Kongres yang seharusnya mempunyai hak untuk melihat versi yang tidak disensor (Friedman, 2026). Menurut Krasner, kondisi seperti ini bukan sebagai sebuah kegagalan sistem, melainkan bagian dari cara negara besar beroperasi, dan justru karena itu dampaknya terhadap kredibilitas internasional menjadi lebih sulit dibantah sebagai sekadar kesalahan teknis.

Ketiga teori yang telah dijelaskan, konstruktivisme, *soft power*, dan *organized hypocrisy*, saling berkaitan dalam penelitian ini. Konstruktivisme menjelaskan mengapa identitas AS sebagai promotor transparansi itu penting dan mengapa kerusakan identitas tersebut berdampak jauh di ranah

internasional. *Soft power* menjelaskan secara lebih detail apa aspek yang dipertaruhkan, terkhusus nilai-nilai politik dan kebijakan luar negeri Amerika yang selama ini menjadi sumber daya tariknya di mata dunia. Dan *organized hypocrisy* menjelaskan bahwa yang terjadi dalam kasus Epstein Files bukan hal baru, melainkan bagian dari pola yang sudah lama ada dalam cara negara besar berperilaku.

Pembahasan

Epstein Files Transparency Act disahkan pada 19 November 2025 dengan dukungan yang hampir tidak bisa dibantah, 427 berbanding 1 di House of Representatives, dan bulat di Senat (United States Congress, 2025). Undang-undang ini mewajibkan jaksa agung untuk merilis seluruh dokumen tidak terklasifikasi terkait Epstein dalam 30 hari, serta secara eksplisit melarang penyembunyian dokumen atas dasar rasa malu, kerugian reputasi, maupun kepentingan politik apapun (United States Congress, 2025). Namun, tenggat waktu hingga 19 Desember 2025 tersebut tidak dipatuhi. DOJ pada awalnya hanya merilis sebagian kecil dokumen, dan berdasarkan dari apa yang dirilis pun redaksi tetap diterapkan secara masif, beberapa dokumen sepanjang lebih dari 100 halaman seluruhnya dihitamkan (Layne, 2025). Democracy Docket juga ikut melaporkan bahwasanya per awal Januari 2026, DOJ baru merilis kurang dari 1 persen dari total dokumen yang mereka miliki (Democracy Docket, 2026). DOJ juga mengumumkan penemuan lebih dari 1 juta dokumen tambahan yang sebelumnya tidak masuk dalam peninjauan, yang semakin memperlambat keseluruhan proses (CNBC, 2025).

Situasi semakin memanas pada bulan Februari tahun 2026, ketika anggota Kongres yang diundang oleh DOJ untuk melihat berkas di ruang baca khusus ternyata pun masih menemukan halaman-halaman yang disensor. Rep. Ro Khanna menyampaikan langsung kepada wartawan bahwa beliau masih melihat versi yang tersensor padahal seharusnya tidak demikian (NBC News, 2026). Rep. Raskin menyebut redaksi yang ada sebagai sesuatu yang membingungkan dan misterius, lalu pada 6 Maret 2026, Rep. Laura Friedman secara resmi mengirimkan surat kepada jaksa agung dan direktur FBI, menyatakan bahwasanya DOJ telah melanggar Epstein Files Transparency Act setelah ia sendiri menemukan ratusan halaman yang masih sepenuhnya ditutup dan dibiarkan rancu tanpa penjelasan (Friedman, 2026).

Persoalan di sini bukan hanya perihal seberapa banyak yang disembunyikan, tetapi juga pada bagaimana pola penyembunyian itu bekerja. Laporan TIME pada bulan Maret 2026 mencatat bahwa redaksi diterapkan secara tidak konsisten, yang berarti nama-nama figur tertentu muncul tanpa sensor sementara yang lain tetap samar, tanpa adanya kriteria spesifik. Nama-nama dari satu sisi politik lebih banyak muncul dibandingkan dari sisi lain, padahal undang-undang sendiri telah melarang penyensoran yang berbasis kepentingan politik (TIME, 2026). NPR juga turut serta dalam melaporkan bahwasanya alih-alih membuat spekulasi publik mereda seperti yang diharapkan di awal, proses perilisan seperti ini justru memunculkan lebih banyak pertanyaan dan teori baru (NPR, 2026).

Jika kita tarik menuju sisi hubungan internasional, pola ini mempunyai implikasi yang lebih luas. AS, seperti yang sudah disebutkan, secara rutin menggunakan transparansi sebagai acuan dalam menilai tata kelola negara lain melalui laporan tahunan Departemen Luar Negeri. Ketika AS itu sendiri melakukan redaksi dokumen terkait jaringan kejahatan transnasional tanpa penjelasan yang bisa dianggap valid serta konsisten, aktor-aktor internasional memiliki alasan yang sah untuk mempertanyakan standar yang selama ini mereka gunakan. Florini (2007) sudah menuliskan bahwa kerahasiaan yang berlebihan bukan sekadar terbatas pada merusak demokrasi dari dalam, atau kata lainnya adalah hal ini tidak hanya merusak dari sisi internal saja, tetapi juga melemahkan kepercayaan yang menjadi dasar hubungan antar negara.

Sebelum Epstein Files memuncak pun, tanda-tanda pelemahan *soft power* Amerika bahkan sudah dapat diukur secara empiris. Brand Finance dalam Global Soft Power Index 2026 yang dirilis di Davos pada Januari 2026 menunjukkan bahwa AS mengalami penurunan *soft power* paling tajam di antara 193 negara yang disurvei, dengan skor turun 4,6 poin dibandingkan tahun sebelumnya (Brand

Finance, 2026). Laporan tersebut secara jelas menyebut penurunan tajam terhadap standar etika dan hak asasi manusia Amerika sebagai salah satu faktor pendorong utama penurunan ini.

Mengikuti kerangka dari Nye, *soft power* bekerja paling efektif ketika kebijakan suatu negara dipandang konsisten oleh pihak yang lain. Ketika kebijakan itu terlihat selektif, daya tariknya tidak hanya berubah lantas berkurang, ia pun berpotensi untuk menjadi sebuah bumerang. Negara-negara yang selama ini merupakan sasaran dari kritik Amerika soal transparansi, kini memiliki bahan untuk balik mempertanyakan konsistensi Amerika sendiri, dan mereka tidak perlu melebih-lebihkan apapun untuk melakukannya.

Satu aspek yang perlu betul-betul disorot di sini adalah bahwa jaringan kejahatan Jeffrey Epstein tidak lagi bersifat domestik. Korban, orang-orang yang diduga terlibat, dan transaksi yang terdokumentasi pun ikut mencakup warga negara dan wilayah di luar AS. Ketika informasi tentang jaringan ini disembunyikan dengan alasan keamanan nasional, pertanyaan yang sangat wajar muncul dari komunitas internasional adalah, keamanan nasional siapa yang sekarang sedang dimaksud?

Mengacu kepada kerangka konstruktivisme milik Wendt, identitas suatu negara diuji dalam interaksinya dengan pihak lain. Amerika membangun identitas sebagai pendorong akuntabilitas global salah satunya dengan melalui tekanan yang diberikan kepada negara lain. Ketika identitas itu diuji pada kasus negaranya sendiri dan hasilnya tidak konsisten dengan apa yang mereka suarakan, dampaknya tidak terbatas pada satu isu saja, melainkan menyentuh keseluruhan posisi moral Amerika yang telah dibangun selama bertahun-tahun, atau *snowballing effect*.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari perspektif hubungan internasional, ketidakkonsistenan ini berefek langsung pada posisi AS di ranah global. Identitasnya sebagai promotor transparansi dan demokrasi, yang selama bertahun-tahun telah dibangun melalui kebijakan luar negeri dan tekanan diplomatik terhadap negara lain, menjadi lebih sulit untuk dipertahankan ketika negara itu sendiri tidak mampu memenuhi standar yang disuarakan. Data empiris dari Brand Finance Global Soft Power Index 2026 mencatat jelas penurunan soft power Amerika adalah yang paling tajam di antara 193 negara, dengan penurunan persepsi terhadap standar etika dan HAM sebagai salah satu faktor utama. Kondisi ini memberi ruang bagi aktor-aktor internasional lain untuk mulai mempertanyakan kredibilitas Amerika, dan memperlemah posisi tawarnya dalam isu-isu demokrasi global.

Maka karena demikian, adanya ketidaktransparanan dalam publikasi Epstein Files ini bukan sekadar persoalan domestik, melainkan juga ikut menyentuh dimensi yang lebih luas, yakni tentang sejauh mana sebuah negara bisa mempertahankan legitimasi citranya di mata dunia ketika fakta yang dilakukan tidak berbanding lurus dengan nilai yang terus-menerus dipromosikan

DAFTAR PUSTAKA

- Al Talei, R. (2021). *The Dilemma of U.S. Democracy and Human Rights Promotion in the Middle East*. Washington D.C.: *Carnegie Endowment for International Peace*. Diakses dari: <https://carnegieendowment.org>
- Ayuningtyas, W. E. P., dkk. (2025). Paradoks Soft Diplomacy Amerika Serikat: Diplomasi Budaya melalui Program AMINEF Terhadap Kebijakan Migrasi Restriktif. *Jurnal Riwayat*, 8(4). <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.50066>
- Brand Finance. (2026). *Global Soft Power Index 2026*. London: *Brand Finance*. Diakses dari: <https://brandfinance.com>
- Carnegie, A. (2021). Secrecy in International Relations and Foreign Policy. *Annual Review of Political Science*, 24(1), 213–233. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-041719-102430>
- CNBC. (2025, Desember 24). DOJ says more than 1 million potential Epstein files newly uncovered. Diakses dari: <https://www.cnn.com>

- Democracy Docket. (2026, Januari 6). Less than 1% of Epstein files have been released, DOJ admits. Diakses dari: <https://www.democracymocket.com>
- Florini, A. (Ed.). (2007). *The Right to Know: Transparency for an Open World*. New York: Columbia University Press.
- Friedman, L. (2026, Maret 6). Rep. Friedman demands answers after finding hundreds of "unredacted" Epstein files still redacted. Diakses dari: <https://friedman.house.gov>
- Internationale Politik Quarterly. (2026, Februari 9). *Does the Decline of US Soft Power Matter?* Diakses dari: <https://ip-quarterly.com>
- Krasner, S. D. (1999). *Sovereignty: Organized Hypocrisy*. Princeton: Princeton University Press.
- Layne, N. (2025, Desember 20). *Republican critics fear incomplete disclosure of Epstein files*. Reuters. Diakses dari: <https://www.reuters.com>
- NBC News. (2026, Februari 10). *Even inside the DOJ's secure room, some Epstein files remain redacted*. Diakses dari: <https://www.nbcnews.com>
- NPR. (2026, Januari 2). *Epstein files release breeds more conspiracy theories*. Diakses dari: <https://www.npr.org>
- Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.
- TIME. (2026, Maret 11). *What's redacted in the new Epstein files and what isn't*. Diakses dari: <https://time.com>
- United States Congress. (2025). H.R.4405 – *Epstein Files Transparency Act, Public Law 119-38*. Diakses dari: <https://www.congress.gov>
- U.S. Department of State. (2024). *Country Reports on Human Rights Practices*. Diakses dari: <https://www.state.gov>
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics. *International Organization*, 46(2), 391–425.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.